

PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMEPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD IHSAN

NIM: 10370006

PEMBIMBING:

Dr. SUBAIDI, S. Ag., M. Si.

SIYASAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perbedaan latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks menyebabkan konsep-konsep umum tentang politik juga beragam. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan, dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu, nabi Muhammad tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Hamka merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang juga merumuskan tentang pemerintahan berdasarkan teks yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian ini termasuk penelitian *histories factual* yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisa induktif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories dan pendekatan politik.

Hasil penelitian ini adalah bentuk pemerintahan menurut Hamka dalam suatu negara ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah Khalifah, karena itu Tuhan membiarkan fikiran Khalifah-Nya tumbuh sendiri. Setelah Rasulullah S.a.w wafat, beliaupun tidak suka menentukan siapa penggantinya. Melainkan diserahkan kepada yang tinggal untuk memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting yang menjadi ajaran prinsip yaitu *Syūrā* (musyawarah). Memutuskan segala sesuatu urusan dengan musyawarah. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan, Hamka berpendapat bahwa pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem manapun, akan tetapi prinsip *syūrā* janganlah sekali-kali ditinggalkan. *Syūrā* merupakan unsur pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam serta sebagai dasar politik pemerintahan. Adapun relevansi pemikiran hamka dalam sistem politik modern Indonesia, *pertama*, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila pertama mempunyai arti bahwa, adanya kesucian hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Islam bagi penganut-penganutnya, menurut dasar sila yang beradil dan beradap. Jadi, demokrasi yang dianut negara Indonesia adalah demokrasi ketuhanan. Terhadap pendapat Hamka yang menganut paham teokrasi, hal di atas dapat relevan dengan moderat. *Kedua*, dengan adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi parlementer yang berlaku di Indonesia, maka dapat disalurkan dengan pemikiran Hamka tentang *syūrā* yang menjadi ajaran Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 10370006
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Pemerintahan Islam Menurut Hamka", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 06 Mei 2015

Yang Menyatakan,



Muhammad Ihsan

NIM. 10370006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 10370006
Judul Skripsi : **"Pemerintahan Islam Menurut Hamka"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2015
Pemimbing,

Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

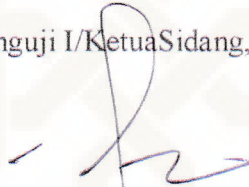
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2045/2015

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 10370006
Telah dimunaqasyahkan pada : 5 juni 2015
Nilai Munaqasyah : A- (94)
dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

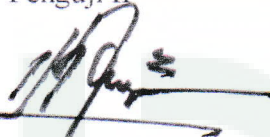
TIM MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,



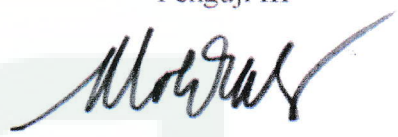
Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 003

Penguji III



Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 002

Yogyakarta, 5 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmudah Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syāms</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

"Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang yang Sabar"



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

APA dan IBU

Yang selalu memberikan curahan perhatian, kasih sayangnya dan do'a selama ini.

Saudara-saudaraku

*Da Nandi, Da Bobby, Kak Yorry
yang selalu memberikan motivasi dan semangat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemerintahan Islam Menurut Hamka”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Pemerintahan Islam Menurut Hamka” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

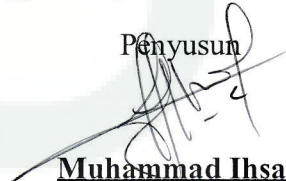
4. Para Dosen dan Karyawan Program Studi Siyasa (Ketatanegaraan dan Politik Islam) yang telah memberi bantuan selama penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahanda Budiman dan Ibunda Indrawati yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
6. Ketiga orang kakakku (Da Nandi, Da Bobby, Kak Yori) yang selalu memberi motivasi.
7. Teman-teman Jinayah Siyasa angkatan 2010 dan teman-teman asrama mahasiswa Tanjung Raya Yogyakarta yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 06 Mei 2015

Penyusun


Muhammad Ihsan
NIM. 1037006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitan.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KERANGKA TEORI PEMIKIRAN HAMKA TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM.....	14
A. Defenisi <i>Critical Discourse Analysis</i>	14
B. Bentuk dan Karakteristik Pemerinatahan Islam.....	18
C. Dasar-dasar Sistem Pemerintahan Islam	25
BAB III PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PANDANGAN HAMKA	29
A. Biografi dan Kondisi Sosial Politik Hamka	29

B. <i>Critical Discourse Analysis</i> Pemerintahan Sebagai Teks.....	34
C. Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Hamka.....	36
1. Defenisi Pemerintahan Islam.....	36
2. Bentuk dan Sistem Pemerintahan Islam Menurut Hamka.....	40
3. Kepala Negara Dalam Pemerintahan Islam Menurut Hamka	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAMKA TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM.....	58
A. Analisis Pemikiran Hamka Tentang Pemerintahan Islam	58
B. Relevansi Pemikiran Hamka Dalam Sistem Politik Modern Indonesia....	71
C. Keunggulan dan Kelemahan Pemikiran Hamka.....	79
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
CURRICULUM VITAE	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperbincangkan mengenai pemerintahan dalam pandangan Islam merupakan suatu yang selalu menarik karena setiap pemikir-pemikir muslim yang berbicara mengenai politik mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang melahirkan cara pandangan atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang menjadi rujukan oleh masing-masing kelompok Islam itu satu yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Rujukan kepada Islam baik yang otentik maupun yang tercemar telah membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial umat Islam, akibatnya melahirkan semacam fragmentasi pemahaman keagamaan antara umat dan pemimpin umat.¹

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perbedaan latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks menyebabkan konsep-konsep umum tentang politik juga beragam. Misalnya, konsep suatu pemerintahan tidak selalu sama dalam

¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, cet 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2008), hlm. 4.

kalangan Islam itu sendiri. Ada pihak Islam yang justru mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang memperjuangkan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan sistem pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam, bahkan ada kalangan Islam yang justru memperjuangkan agar tegaknya *khilafah Islamiyah*.

Wilyah-wilayah berpenduduk muslim, menghadapi persolan pelik yang sama, terutama setelah mereka menjadi negara merdeka pasca kolonialisasi Barat pada seperempat pertama abad ke-20 M. Negeri-negeri seperti, Turki, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Maroko, Pakistan, Syiria, Aljazair, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia, mengalami kesulitan dalam menentukan konsep negara yang memungkinkan. Apakah akan mengikuti kosep integral atau sekuler. Dalam prosesnya, di negeri-negeri tersebut terjadi beragam faksi, friksi bahkan ketegangan yang tajam.²

Sebagai wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim, kenyataan itu tentu mengherangkan. Sehingga layak diajukan pertanyaan apakah Islam relevan dengan atau tidak dengan sistem politik Barat yang sekuler. Apakah konsepsi politik harus mengacu pada masa lalu Islam (romantisme) yang

² Muhammad Nur, *Negara Islam Indonesia no Negara Indonesia Islam yes: Pergulatan Konsep Negara dalam Peradapan Islam Modern* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 3.

integralistik. Apakah Islam memiliki konsep dalam cetak biru tentang sistem politik serta konsep pemerintahan seperti apa yang dikehendaki oleh Islam.

Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara dalam pemikiran politik Islam telah mengalami puncaknya selama antara tahun 1956-1959. Selama rentang periode tersebut banyak intelektual muslim yang berbicara tentang negara berdasarkan Islam, khususnya dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang memperdebatkan masalah ideologi dan dasar negara. Di dalam perdebatan tersebut, ideologi Islam berkompetisi dengan ideologi Pancasila dan ideologi sosial-ekonomi.³

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan, dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu, nabi Muhammad tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dalam perjalanan sejarah bentuk pemerintahan sejak zaman nabi Muhammad sampai sekarang bahkan sampai masa mendatang akan berkembang sesuai zaman.⁴

³ Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta; Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm 5.

⁴ Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 10.

Berangkat dari latar belakang ini, penyusun sangat tertarik mengkaji dan mendalami lagi bagaimana sebenarnya mengenai bentuk pemerintahan Islam menurut salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia yaitu Hamka. Sebagaimana kita ketahui Hamka adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas dan agar pembahasan lebih terarah dengan baik penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah yang akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam?
2. Bagaimana relevansi pemerintahan Islam menurut Hamka dalam sistem politik modern Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pemikiran Hamka secara utuh dan mendalam tentang pemerintahan Islam.

- b. Mengetahui urgensi dan relevansi pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam bagi pengembangan Islam dan peradaban.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi maupun peneliti, khususnya bagi mahasiswa jurusan Siyasah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi publik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Obyek kajian mengenai Hamka telah dilakukan oleh banyak peneliti lainnya. meskipun demikian, cukup jarang karya tulis yang meneliti secara spesifik mengenai pemerintahan Islam menurut Hamka, untuk itu penyusun menggunakan beberapa karya yang membahas mengenai Hamka maupun tentang politik dalam Islam. Skripsi Sartiman Suriadi yang berjudul “Penafsiran Hamka Tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar”.⁵ Dalam skripsi tersebut Sartiman menjelaskan sebuah politik menurut Hamka yang indikatornya adalah musyawarah, negara dan kepala negara dan hubungan

⁵ Sartiman Setiawan, *Penafsiran Hamka Tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar*, skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

agama dan negara. Menurut Hamka, politik harus bermoral yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut ditujukan buat pelaku politik. Adapun indikatornya adalah, amanah, adil dan sabar dalam menjalankan kepemimpinannya. Jika indikator tersebut dilaksanakan, maka akan menghasilkan sebuah perpolitikan yang islami.

Muhammad Damami dalam bukunya *Tasauf Positif Dalam Pemikiran Hamka*. Buku ini sedikit menjelaskan tentang kiprah Hamka di dunia politik akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana pemikiran Hamka tentang politik secara spesifik.⁶

Seorang peneliti dari Barat, James Rush selama satu tahun melakukan riset tentang Hamka sebagai ulama, reformer, guru dan sastrawan. Dalam risetnya yang berjudul *Hamka dan Indonesia Modern* James Rush menganalisa tentang arti penting Hamka sebagai pelaku sejarah dalam menuangkan ide-ide besarnya terhadap pembangunan di Indonesia.⁷

Syaikh, dalam bukunya yang berjudul *Hamka: Ulama-Pujangga-Politikus di Mata Hati Umat*, menjelaskan bahwa Hamka adalah

⁶ Muhammad Damami, *Tasauf Positif dalam Pemikiran Hamka* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000) hlm.72.

⁷ James Rush, *Hamka dan Indonesia Modern, Dalam Kenang-kenangan 70 tahun Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) hlm. 446.

sosok ulama, pujangga sekaligus politikus handal yang memberikan kontribusi berupa solusi khusus terhadap permasalahan nasional.⁸

Skripsi Muji yang berjudul *Politik Menurut Hamka (Kajian Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar*. Muji menyimpulkan bahwa kedaulatan mutlak Tuhan diartikan Hamka sebagai kedaulatan moral sehingga dalam hirarki ketaatan pada pemimpin adalah taat kepada Allah sebagai ketaatan moral.⁹

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengajarkan ketentuan yang jelas mengenai pemerintahan dalam Islam.¹⁰ Meski demikian prinsip-prinsip dan perintah moral mengisyaratkan tentang pentingnya penguasa. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِىْ اَمْرٍ مِّنْكُمْ

⁸ A. Syaikh, *Hamka: Ulama-Pujangga-Politikus dalam Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 255.

⁹ Muji, *Politik Menurut Hamka (Kajian Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar)*, skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

Ayat tersebut memerintahkan agar mentaati Allah, Rasul, dan *Ulil Amri*. Tujuan dari pemmbutan negara itu adalah untuk melaksanakan ketentuan Allah baik yang ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Berdasarkan hal ini tidak ada jalan lain untuk merumuskan tujuan dan cita-cita tersebut kecuali dengan adanya ketundukan dan ketaatan seluruh umat kepada kepala negara yang akan melaksanakan hukum dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Mengkaji Islam politik bukanlah persoalan yang mudah, karena adanya pemahaman yang menyeluruh tentang agama yang dijadikan landasan menggerakkan suatu perlawanan, atau yang disebut sebagai ideologi, yang merupakan inti kesadaran suatu politik. Dinamisme politik Islam selalu berawal dari diskurs (wacana) yang berkembang ditengah atsmofir pemikiran lainnya dalam memahami Islam secara sebenarnya.¹¹

Diskurs adalah simbol-simbol bersama yang dipakai dalam komunikasi dan konsepsi realitas yang pelik pada sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam pemikiran tradisi Islam, sejak awal diyakini bahwa teks itu tidak hanya terbatas pada teks kitab suci al-Qur'an saja, bahkan prilaku kenabian itu sendiri juga merupakan teks yang kesemuanya menyimpan dan hendak mengkomunikasikan makna dan pesan yang dikandungnya. Sejak

¹¹ Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam* (Darul Falah, 1999), hlm. 11.

pertama kali al-Qur'an diwahyukan, ia sudah melakukan dekonstruksi radikal terhadap epistemologi, diskursus serta syair-syair Jahiliyah waktu itu.

Diskursus¹² sangat sesuai untuk melihat hal-hal yang implisit yang terdapat dalam alam pikir suatu kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Meskipun dengan identitas yang sama, namun memiliki aspirasi yang berbeda.

Untuk mengetahui pemerintahan Islam menurut pemikiran Hamka, maka dalam skripsi ini penyusun menggunakan teori *Critical Discourse Analysis* (analisis wacana kritis) selanjutnya disebut CDA. Analisis wacana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat di ketahui. Jadi, wacana dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subyek dan berbagai tindakan representasi.

Dalam studi analisis wacana (*discourse analysis*), pengungkapan seperti itu dimaksudkan dalam kategori analisis wacana kritis. Pemahaman dasar CDA adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai obyek studi

¹² Pengertian sederhana 'diskursus' atau wacana adalah cara manusia-pada periode, dalam golongan sosial, atau bidang keahlian tertentu. Lihat Mohamme Arkoun, *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru* (Jakarta: INIS, 1999) hlm. 21-22.

bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis disini berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai rumusan dan cara yang sistematis untuk menemukan, mengembangkan, bahkan menguji obyek kajian, agar suatu karya tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metodologi ilmiah.¹⁴ Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni menggali bahan-bahan atau data-data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal dan

¹³ Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: PT. LkiS, 2001), hlm. 7.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm . 3.

sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan dalam pandangan Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menjelaskan terhadap masalah yang akan diteliti, dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang berasal dari sumber data utama (*primary sources*), maupun sumber data pendukung (*secondary sources*).

Sumber data utama adalah buku atau tulisan yang dihasilkan oleh Hamka sendiri seperti, Tafsir Al-Azhar, Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, dan Sejarah Umat Islam. Sedangkan sumber data pendukung adalah yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal, majalah, internet atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik yaitu pendekatan yang melihat pemikiran seseorang dari sisi politik.

5. Metode Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif,¹⁵ yaitu metode penelitian yang berangkat dari pemikiran politik Islam yang sifatnya umum dan kemudian digunakan untuk menilai partikularitas-partikularitas dari pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah dan memperoleh kajian yang konsisten dan terarah maka diperlukan uraian yang sistematis. Sistematika skripsi ini akan memuat lima bab yang terbagi dari beberapa sub bab untuk membedakan pembahasan.

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas kerangka teori *critical discourse analysis* dalam pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam. Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai CDA, karakteristik pemerintahan Islam dan dasar-dasar sistem pemerintahan Islam.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42

Bab ketiga, tentang biografi Hamka yang mengulas tentang riwayat hidup serta perjuangannya sebagai tokoh pemikir Islam, kondisi sosial politik dan pengaruh terhadap pemikirannya, serta karya-karyanya. Pada bab ini dijelaskan bagaimana bentuk pemerintahan Islam menurut pandangan Hamka serta kepala negara dalam pemerintahan Islam menurut Hamka.

Bab keempat, merupakan pokok kajian yang menjelaskan secara keseluruhan bagaimana bentuk pemerintahan Islam menurut Hamka. Dari uraian bab ini pembaca akan mengetahui dengan jelas bagaimana bentuk pemerintahan Islam serta mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Hamka dalam sistem politik modern Indonesia.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul “Pemerintahan Islam Menurut Hamka”, membuahkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk pemerintahan dalam suatu wilayah menurut Hamka ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah Khalifah, karena itu Tuhan membiarkan fikiran Khalifah-Nya tumbuh sendiri. Hanya satu yang penting yang menjadi ajaran prinsipal yaitu *Syūrā* (musyawarah). Memutuskan segala sesuatu urusan dengan musyawarah. Di sisi lain Hamka menegaskan bahwa, hendaklah pemerintahan yang dijalankan dapat menjamin kemaslahatan hakiki umat manusia. Ini merupakan usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat dengan membimbing mereka ke jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan, Hamka berpendapat bahwa pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem manapun, akan tetapi prinsip *syūrā* janganlah sekali-kali ditinggalkan. *Syūrā* merupakan

unsur pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam serta sebagai dasar politik pemerintahan.

Pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam lahir atas kognisi sosial, yakni adanya politik golongan-golongan yang melingkupi kehidupan Hamka pada waktu itu. Sudah mafhum, pada era paska kemerdekaan Bangsa Indonesia mengalami kondisi politik yang tidak menentu yang dibuktikan dengan timbulnya polemik diantara para tokoh. Ditambah dengan corak pemikirannya yang diekspresikan ketika dalam tahanan yang sedikit banyaknya memberikan warna pemikiran Hamka. Sehingga sangat lazim bila Hamka mengaitkan pemikirannya dengan berbagai peristiwa kontemporer dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

2. Adapun relevansi pemikiran Hamka dalam sistem politik Indonesia, pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila pertama mempunyai arti bahwa, adanya kesucian hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Islam bagi penganut-penganutnya, menurut dasar sila yang beradil dan beradap. Jadi, demokrasi yang dianut negara Indonesia adalah demokrasi ketuhanan. Terhadap pendapat Hamka yang menganut paham teokrasi, hal di atas dapat relevan dengan moderat. Kedua, dengan adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi

parlementer yang berlaku di Indonesia, maka dapat disalurkan dengan pemikiran Hamka tentang *syūrā* yang menjadi ajaran Islam.

Pemikiran Hamka dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam konteks kekinian (modern). Kendati Hamka tidak memberikan tawaran mengenai konsep pemerintahan yang ideal bagi umat Islam, tetapi sebenarnya ia ingin menegaskan bahwa dalam masalah politik kenegaraan, Islam tidak pernah mengisyaratkan suatu yang harus diikuti oleh umat Islam. Islam tidak pernah meletakkan prinsip-prinsip baku bagi sebuah sistem pemerintahan, karena dalam mengelola urusan politik, Nabi Muhammad pada dasarnya tidak banyak merubah pola pemerintahan yang telah berlaku dalam masyarakat pra-Islam. Umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa lebih cocok dan memungkinkan umat Islam dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan kondisi dan lingkungan baru. Mengidolakan masa lampau (masa pemerintahan Negara Madinah), bukan merupakan pilihan bijak untuk mengeluarkan umat Islam dari keterpurukan dan ketertinggalan, namun justru hanya akan membalikkan umat Islam pada masa yang ia sendiri tidak terlibat di dalamnya. Negara Madinah adalah cermin kehidupan politik masyarakat tribal semi-primitif abad ke-7 M, yang

tentunya hanya cocok dan sesuai jika diterapkan pada kehidupan masyarakat tribal saat itu.

B. Saran

1. Banyak nilai-nilai politik yang terdapat di dalam al-Qur'an sebagai panutan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu negara-negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas muslim haruslah memperhatikan nilai-nilai tersebut dan menerapkannya pada peraturan-peraturan pemerintahan. Dengan pendekatan moral-etik al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku menjadikan tradisi dalam rangka membangun cita-cita Islam yang mengajarkan kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus lebih digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah umat Islam di zaman modern bisa dikatakan masih sedikit.
2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi khazanah pemikiran Islam terutama dalam bentuk menjalankan roda pemerintahan, dan apa-apa yang menjadi hasil kajian yang penyusun angkat semoga menjadi wacana baru pemahaman pemerintahan Islam dan untuk semua kalangan, baik akademis maupun non-akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syaikh, *Hamka; Ulama-Pujangga-Politikus dalam Hamka di Mata Hati Umat* Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Abdillah, Masykuri, *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Prespektif Sejarah dan Demokrasi Modern* Jakarta: Tashwirul afkar, 2000.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Hakikat Sitem Politik Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Ahmad, Munawar, *Merunut Akar Pemikiran Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis Sebagai Alternatif Metodologi*, Yogyakarta: Gava Media, 2007.
- Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, Darul Falah, 1999.
- Arkoun, Mohamme, *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagi Tantangan dan Jalan Baru* Jakarta: INIS, 1999.
- Azam, Alim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1990.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damami, Muhammad, *Tasauf Pisitif dalalm Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2000.
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT. LkiS, 2001.
- Esposito, Jhon L, *Ensiklopedi Oxford* Bandung: Mizan, 2001.
- Ghafar Aziz, Abdul, *Islam Poltik Pro Dan Kontra*, ter. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hakim, Ahama, M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama, Tafsir Politik Hamka* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamka, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

- , *Islam Revolusi Ideologi Dan Keadilan Sosial* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- , *Kenangan Hidup* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Sejarah Umat Islam*, cet. Ke-5 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Tafsir Al-Azhar*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- Hardjosasoto, Suhartoyo, *Perwujudan Demokrasi Pancasila di dalam Sistem UUD 1945*, Cet. II Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Hatta, Muhammad, "Hamka 70 Tahun" dalam *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1978.
- Husein Haikal, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Juliatma Syamsar, Aria, "Konsep Pemerintahan Islam Studi Komperasi antara Pemikiran Politik Ayatullah Khomainsi dan Muhammad 'Abid al-Jabiri", skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, cet 1 Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2008.
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Kencana Syafii, Inu, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Khan, Qomarudin, *Tentang Teori Politik Islam*, alih bahasa: Taufik Adu Amal, Bandung: Pustaka, 1987.
- Lemhanas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Cet. XVIII Jakarta: Gramedia, 1996.
- Maududi, Abu A'la al, *Khalifah dan Kerajaan*, alih Bahasa: Muhammad al-Bakir Bandung: Mizan, 1984.
- Maududi, Abu A'la al, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa: Adnan Syamini, Jakarta: Media Dakwah, 1985.
- Mu'iz Ruslan, Utsam Abdul, *Pendidikan Politik Iqwanul Muslimin Solo*: Intermedia, 2000.
- Mubarak, Muhammad al, *Sistem Pemerintahan dalam Prespektif Islam*, alih Bahasa: Firman Hariyanto, cet. Ke-1 Solo: Pustak Mantiq, 1995.

- Muji, "Politik Menurut Hamka (Kajian Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Politik dalam Tafsir al-Azhar)", skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Musa, Yusuf, *Politik Dan Negara Dalam Islam* Surabaya: al-Ikhlas, 1990.
- Nasution, Harun dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cet. X Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nur, Muhammad, *Negara Islam Indonesia no Negara Indonesia Islam yes: Pergulatan Konsep Negara dalam Peradapan Islam Modern*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Qadim Zullum, Abdl, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet, ke-6, Bangli: al-Izzah, 1997.
- Qardhawi, Yusuf al, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Paritsipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, alih Bahasa: Syafril Halim, cet ke-1 Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rais, Dhiaudin, *Teori Politik Islam* Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Rasyid, S.M., "Kenangan-kenangan Bekerjasama dengan Hamka" dalam kenang-kenangan 70 tahun, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Rush, James, *Hamka dan Indonesia Modern, Dalam Kenang-kenangan 70 tahun Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Setiawan, Sartiman, *Penafsiran Hamka Tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar*, skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Edisi V Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syafii Maarif, Ahamad, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan Konstituante* Jakarta: LP3ES, 1996.
- Tamara, Natsir (dkk), *Hamka di Mata Hati Umat* Jakarta: PT Sinar Harapan, 1984.

Yani Anshori, Ahmad, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*, Cet. I Yogyakarta; Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Ihsan
Tempat / Tgl. Lahir : Simalanggang, 11 September 1991
Nama Ayah : Budiman
Nama Ibu : Indrawati
Alamat Rumah : Dalam Koto, Nagari Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh,
Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
E-mail : mhd.ihsan09@gmail.com
No. HP : 085363072420

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 01 Nagari Taeh Baruah
SMP : Madrasah Sumatera Thawalib Parabek
SMA : MAN 2 Payakumbuh
Perguruan Tinggi : Prodi Siayash Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.